Memberikan pinjaman adalah amalan yang sangat bagus. Amalan ini dapat memudahkan kesulitan yang dihadapi manusia terutama seorang muslim dalam pemenuhan hajatnya. Oleh karena itu, kebolehan hutang piutang memberikan kemudahan bagi manusia dalam pergaulan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan. Realitanya dalam kehidupan manusia ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Dengan demikian, orang yang kekurangan dapat berhutang kepada orang yang berkecukupan melalui pemanfaatan hartanya.

Adapun hukum menghutangi orang lain, sebagai berikut :

- a. Hukumnya sunnah jika dasarnya adalah tolong menolong dalam kebaikan
- b. Hukumnya wajib jika dasarnya orang yang berhutang itu benar-benar memerlukannya
- c. Hukumnya haram jika digunakan untuk bermaksiat
- d. Hukumnya makruh jika benda yang dihutangkan digunakan untuk sesuatu yang makruh.

3. Rukun Dan Syarat Hutang

Transaksi hutang piutang dapat menjadi akad yang sah, apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu yang sesuai dengan syara'. Seperti transaksi muamalah pada umumnya.

- a. Rukun Utang – Piutang

2. Orang yang memberikan hutang merupakan orang yang sah untuk melakukan, maka seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim dan pengurus wakaf tidak boleh menghutangkan barang wakaf.

Pada umumnya ahli fiqh berpendapat bahwa apa yang sah untuk dijual belikan maka sah pula untuk dihutangkan, baik barang yang ditakar ataupun ditimbang atau uang. Adapun barang yang serupa boleh dihutangkan dan debeturnya mengembalikan dengan uang senilai barang tersebut, sebagian ulama berpendapat, tidak sah menghutangkan barang seperti mutiara, karena tidak mempunyai padanan atau ukuran uang yang berpendapat seperti ini adalah golongan Hanafi dan adapun pendapat kedua membolehkan karena barang tersebut dapat dikembalikan dalam bentuk nilai uang.

Adapun ketentuan hutang piutang menurut Heri Sudarsono adalah:

- a. Sahnya hutang itu dengan ijab qobul
- b. Barang yang dihutangkan itu menjadi hak milik yang hutang
- c. Diwajibkan kepada orang lain yang berhutang mengembalikan atau membayarnya piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharga

- d. Orang yang menghutangkan berhak menegurnya bila dianggap perlu
- e. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo lagi bila orang yang berhutang belum mempunyai kemampuan
- f. Disunnahkan bagi orang yang menghutangkan, membebaskan sebagian atau semua piutangnya bilamana orang yang berhutang tidak mampu
- g. Orang yang berhutang (*gharim*) berhak mengajukan urusannya kepada hakim (pengadilan) bila mana orang yang berhutang malas membayarnya
- h. Hakim berhak memaksa dan menyita harta benda kepunyaan orang yang berhutang untuk dibayarnya kepada yang menghutangkannya.
- i. Di sunnahkan kepada orang yang berhutang memberi jasa (membalas kebaikan) dengan uang/barang atau tenaga orang yang menghutangkannya, dengan syarat tidak dijanjikan pada waktu akad.

4. Pelunasan Hutang

Utang merupakan sejumlah uang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya pada jangka waktu yang telah disepakati. Wajib membayar utang adalah suatu kelaziman.

menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang.¹⁸ Dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.

Penanggungan *rahn* untuk makna al-Habsu yang artinya menahan terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Mudatsir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

*Artinya : tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*¹⁹

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama' fiqih yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut ulama' Maliki mendefinisikan rahn sebaga harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang bersifat mengikat.²⁰
- b. Menurut ulama' hanafiyah mendefinisikan rahn yaitu menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang menjadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Rahn merupakan harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) uang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا فَيْمَةً مَا لَيْتَ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بَدْنِي بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ الدَّيْنِي كُلِّهَا أَوْ بَعْضَهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

¹⁸ Fatah, Abdul, *Fiqih Islam Lengkap*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),142

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan)

²⁰H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 252

*redaksi yang lain Nabi wafat sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang yahudi dengan tiga puluh liter (sha') sya'ir (jagung)*²⁷

c. Ijma'

Semua fuqaha' sepakat tentang mubah (dibolehkannya) perjanjian gadai diantaranya Imam Yahya Abi Khoir al-Imroni (Mazhab Syafi'iah) dan Ibnu Kudama (mazdhab Hanabillah). Hadist ijma' bahwasannya Rasulullah SAW, pernah menghutang dari Abi syahmin al Yahudi gandum sebanyak 30 sha' ($\pm$ 90 liter) untuk keluarga di kota Madinah setelah

kembali dari perang Tabuk dan sebagai jaminannya adalah baju perang beliau yang harganya 400 Dirham. Para ulama sepakat bahwa *rahn* diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak saling mempercayai.²⁸ Firman Allah SWT tersebut adalah *irsyad* (anjuran baik) kepada orang beriman, sebab dalam salah-satu ayat dinyatakan :

.... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.

Artinya : "Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)." (QS. Al- Baqarah : 283).

3. Rukun Dan Syarat Gadai (Rahn)

a. Rukun Gadai (Rahn)

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 289

²⁸ Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) 161.

ulama fiqh juga sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan utang itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali karena tindakan tersebut termasuk tindakan mensia-siakan harta yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai Jumhur ulama' fiqh selain ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut karena barang tersebut bukan miliknya secara penuh, hak pemegang agunan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan dan apabila penghutang tidak bisa melunasi utangnya barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi hutangnya.

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang gadai memanfaatkan barang tersebut selama ditangannya, maka sebagian ulama' madzhab Hanafi membolehkannya karena dengan adanya ijin maka tidak ada halangan bagi pemegang gadai untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi sebagian ulama' Hanafi lainnya, ulama' madzhab Syafi'i berpendapat sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut, karena apabila barang gadai itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diijinkan dan di ridai pemilik barang bahkan

meminta izin kepada penghutang untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa kompensasi dan modal dari gadai dianggap sebagai hutang. Maka yang demikian ini tidak sah karena telah menjadi hutang dengan menarik manfaat. Adapun jika barang gadai berupa kendaraan dan hewan, maka pemegang gadai boleh mengendarainya dan memerahnyanya sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan tanpa izin penghutang.

Pendapat diatas sama dengan pendapat ulama' Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, *rahin* harus minta izin kepada *murtahin*. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya.

Adapun mayoritas *fuqaha'* dari kalangan Hanafiyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian karena manfaatnya tetap menjadi hak penghutang. Yang memegang atau menerima gadai boleh

- e. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, *Rahn* dipandang habis jika jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* yang membatalkannya.
- f. *Rahin* meninggal, Menurut ulama Malikiyyah, *rahn* habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan borg kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan borg kepada *rahin*. Dan barangnya rusak.